

Konsep dan Praktek Perencanaan Kota

Konflik dan Kasus-kasus

salmina w ginting

Permasalahan Pembangunan Perkotaan

- **Permasalahan Eksternal**
 1. Ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, metropolitan dengan kota menengah dan kecil
 2. Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota
 3. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh
 4. Banyaknya wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan (mis. wilayah perbatasan)

■ Permasalahan internal

1. Kemiskinan di perkotaan
2. Kualitas lingkungan hidup perkotaan
3. Keamanan dan ketertiban kota
4. Kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan

Permasalahan Eksternal

1. Ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, metropolitan dengan kota menengah dan kecil
 - Pertumbuhan kota yang tidak seimbang ditambah dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak etrarah dan tidak terkendali.
 - Secara fisik urbanisasi di Indonesia ditandai oleh:

- Meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya *fringe area* terutama di kota-kota besar dan metropolitan
- Meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan sub-urban yang telah “mengintegrasikan” kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya dan membentuk konurbasi yang tak terkendali.
- Meningkatnya jumlah “kampung kota”
- Terjadinya reklasifikasi (perubahan dari *rural* menjadi *urban*) terutama di P Jawa
- Tingkat pertumbuhan penduduk di kota inti cenderung meningkat sedangkan di daerah sekitarnya menurun

Dampak akibat urbanisasi tsb:

- Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota besar dan metropolitan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
- Terjadinya konversi lahan-lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, industri, dll
- Menurunnya kualitas lingkungan fisik kota akibat perusakan lingkungan dan polusi
- Menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan

Banyaknya wilayah tertinggal, terjadi karena:

- Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju
- Kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar
- Kebanyakan wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia
- Belum diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan PAD secara langsung
- Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah tertinggal ini

Kemiskinan di perkotaan

- Merupakan masalah mendesak yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia
- Ditandai dengan jutaan penduduk yang tinggal di permukiman yang kumuh dan liar (*slums and squatters*), rendahnya pendapatan, kurang gizi dan nutrisi, ketidakamanan, dan kurang penghargaan sosial.
- Akibat krisis moneter tahun 1997 jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat dari 7,2 juta orang menjadi 17,6 juta, atau 9,6% menjadi 22% dari total penduduk.
- Masalah kemiskinan terkait erat dengan ketimpangan (gap), baik ketimpangan antar golongan sosial ekonomi di perkotaan, ketimpangan kota-desa, ketimpangan antar wilayah secara nasional, dll yang seringkali tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial dan budaya.

Kualitas lingkungan hidup perkotaan:

- Menurunnya kualitas udara, air, tanah
- Kondisi permukiman yang terlalu padat, kumuh, dan tidak memenuhi peraturan keselamatan bangunan
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana perkotaan akibat tidak sesuai antara *supply* dan *demand*
- Ketimpangan sosial ekonomi antar golongan atau antar warga
- Kurangnya jaminan perlindungan hukum

Keamanan dan ketertiban kota

- Terjadi banyak sekali kerusuhan seperti issue bom (Bali, JW Marriot, Kedubes Australia, dll) dan konflik antar kelompok masyarakat (Poso, Palu, Ambon, dll)
- Sering terjadi aksi demonstrasi yang tidak tertib dan mengganggu
- Tidak tertib dalam masalah berlalu lintas

Kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan

- Adanya ketentuan desentralisasi dan otonomi menyebabkan daerah harus lebih siap untuk mengelola pembangunan kotanya, meliputi kapasitas SDM, kapasitas struktur kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan kemampuan pembiayaan
- Di beberapa daerah terdapat masalah keterbatasan kemampuan teknis dan profesional untuk menjaring aspirasi masyarakat

- Di bidang legislatif banyak diantaranya yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal dan pengalaman berpolitik, kurang dalam pemahaman akan kebijakan dan kualitas perdebatan politik.
- Beberapa alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan perkotaan antara lain:\ol style="list-style-type: none;">- 1. **Forum Kota**, sebuah forum *ad-hoc* yang secara periodik bertemu untuk mendiskusikan kebijakan perkotaan nasional, yang terdiri dari kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, dan LSM

2. Tim Inti Koordinasi Pembangunan Perkotaan (TIKPP) yang merupakan penyempurnaan dari Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan (TKPP) di masa lalu, untuk koordinasi perumusan kebijakan pembangunan perkotaan
3. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dengan Menteri Koordinasi Urusan Perekonomian sebagai ketua dan menteri Kimpraswil sebagai wakil ketua
4. Badan Kebijakan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) yang berada di tingkat menteri serta diketuai oleh Menteri Kimpraswil
5. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), sebuah lembaga antar departemen yang dibentuk berdasarkan UU No 22/1999

- Pembentukan beberapa instrumen dan institusi seperti Dewan Kota, Dewan Kecamatan, dan Dewan Kelurahan sebagai perwakilan warga diharapkan dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan pembangunan kota.

Terkait dengan kapasitas daerah dalam pengelolaan kota, terdapat beberapa masalah antara lain aspek **kewenangan** dalam arti siapa yang berwenang dalam berbuat apa dan bagaimana, bagaimana struktur kelembagaannya, peran *stakeholder*, masyarakat, swasta, dunia usaha. Bagaimana sistem informasi serta mekanismenya?

Dalam kaitan dengan manajemen perkotaan, titik pangkal tentang bagaimana pembangunan kota ini akan dikelola adalah dengan melakukan perubahan **pola pikir (*mind set*)** kita tentang apa itu kota dan bagaimana kita bersikap atau berbuat terhadap kota.

Kota bukan lagi suatu benda tetapi merupakan suatu ruang kehidupan yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan warga kota.

Kota harus dibangun melalui komitmen bersama warga kotanya.

Pengalaman Daerah

1. Kota pulau yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: Kotamadya Dati II **TARAKAN**
 - Tarakan adalah *the second gate* bagi prov. Kalimantan Timur, setelah Balikpapan. Juga sebagai pusat transit perdagangan bebas Indonesia-Malaysia-Philipina
 - Jumlah penduduk th 2004 sebesar 155.208 jiwa, dengan kepadatan 619 jiw/km².
 - Struktur perekonomian didominasi oleh sektor jasa dan industri (75%), sektor ekstraktif sumber daya alam (14%), lain-lain (11%).

- Kota pulau dengan luas daratan 250,80km², dengan dominansi pasir (*sandy*), miskin unsur hara.
- Peluang investasi yang potensial: perdagangan, industri hilir, manufaktur, elektronik, pariwisata, dan properti.
- Terdiri dari berbagai suku bangsa dari seluruh Indonesia
- Visi kota: The Little Singapore

Kebijakan Pembangunan Kota Tarakan

1. **Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat**
 - Gerakan sadar lingkungan (darling) mulai tingkat kelurahan hingga kota. Pemko memberi dana simultan kepada setiap kelurahan agar program “darling” semakin memasyarakat.
1. **Mengendalikan pertumbuhan penduduk**
 - Penerapan sistem lima jenis KTP untuk menghindari pendatang yang kurang berkualitas dan potensial menimbulkan masalah lingkungan.
1. **Supremasi hukum lingkungan**
2. Menerbitkan **perda** dan **SK Walikota** tentang perlindungan hutan mangrove (pertama di Indonesia), hutan lindung, hutan kota, sempadan sungai, perlindungan tumbuhan dan satwa, dan ketentuan penanaman pohon untuk setiap kelahiran anak dan perkawinan

1. **Penataan ruang**

- Pemilihan lokasi berdasarkan kemampuan daya dukung lahan
- Menambah luas hutan lindung dari luas awal 2400 ha menjadi 6000 ha (lebih dari 40% dari luas lahan!)

1. **Mencegah, mengendalikan, menanggulangi**

- Lebih baik mencegah kerusakan lingkungan dari pada memperbaiki.
- Penyusunan AMDAL, monitoring oleh Pemko dan Dinas LISDA (Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam), membangun kanal dan bendungan

1. **Rehabilitasi lingkungan**

- Penanaman pohon, perlindungan kawasan tangkap hujan, dll dilaksanakan secara terpadu antara pemko, dunia usaha, dan masyarakat

Kerjasama Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan Antar Kota

Kasus: DI Yogyakarta, Kab Sleman, dan Kab Bantul
(Kartamantul)

- Membentuk **Sekretariat Bersama Kartamantul** yang merupakan forum kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah perbatasan tiga pemerintahan daerah.
- Meliputi pengelolaan sumber air, penanganan limbah, sampah, jalan, transportasi dan drainase

- *Technical staff* dalam seluruh kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi, terdiri dari gabungan staf ke-3 kota/kab.
- Berbagi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan: TPA di Piyungan dan IPAL di Sawon
- Berbagi anggaran untuk bantuan operasional kantor SekBer
- Bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan Yogya, SekBer menjadi tempat untuk mengusulkan dan menyampaikan permintaan pelayanan umum
- Untuk pemprov, SekBer menjadi tempat untuk koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menyelaraskan perencanaan propinsi dan kota/kab.
- Untuk para staf, SekBer juga berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan kapasitas anggotanya melalui koordinasi rutin untuk pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jembrana-Bali

- Jembrana adalah satu dari 9 kabupaten di Prov Bali. Luas 841,80 km² atau sekitar 14% dari luas total P Bali.
- Jumlah penduduk th 2004 sebanyak 251.133 jiwa, dengan kepadatan 296 jiw/km². Masih banyak KK miskin, dan PAD sangat minim
- Langkah-langkah yang diambil:

Pemanfaatan SDM

- Perampingan organisasi dan dinas-dinas dari 24 unit mulai sekretariat hingga lurah, menjadi hanya 15
- Mutasi PNS dengan sistem “Job Tender” yang lebih transparan dan bertanggung jawab
- Mekanisme penilaian PNS model DP3 atau oleh kepala bagian diganti dengan tim evaluasi

Pemanfaatan Dana

- Standar harga dinamis berdasarkan toko Makro/grosir yang dievaluasi setiap triwulan untuk menjamin kualitas dan kuantitas barang.

- APBD tidak menjadi standar melainkan didampingi oleh Pola OE (owner Estimate) yang dibuat oleh Konsultan independen

Peningkatan Kualitas Pendidikan

- Program pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri seluruh Jembrana untuk jenjang SD hingga SMU
- Pemberian beasiswa untuk sekolah swasta dan bonus beasiswa untuk yang berprestasi
- Pendidikan dan pelatihan untuk guru ke jenjang D3 hingga S2, dengan subsidi dari pemerintah kab
- Bonus tahunan untuk guru Rp 1 juta, dan insentif Rp 5000,- per jam di luar jam biasa
- Pertemuan rutin seluruh guru dengan Bupati Jembrana setiap bulan
- *Regrouping* SD yang rasionya di bawah standar. Hingga thn 2002 sudah 22 SD di-*regrouping* dan menghemat Rp 3,3 milyar. Dana ini digunakan untuk biaya lain, mis. Pembebasan SPP

- Mengembangkan model sekolah baru yang merupakan gabungan model sekolah SMU Taruna Nusantara, pondok pesantren, dan sekolah di Jepang, pada 2 sekolah contoh. Hasilnya, nilai UAN dan UAS tertinggi se Bali dengan hasil kelulusan 98,84%

Kesehatan

- Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ), yaitu :
 - Bebas berobat ke dokter/dokter gigi/bidan/poliklinik swasta/RS swasta kelas D tanpa dipungut biaya. Dana JKJ diperoleh dari pengalihan subsidi PUskesmas dan RS sehingga puskesmas dan RS menjadi swadan kecuali untuk obat/program yng bersifat nasional.
 - Kerjasama JKJ dengan puskesmas, prakter dokter spesialis, dll

Ekonomi

- Dana bergulir “hibah renteng” dimana setiap dana bantuan turun di suatu desa, maka pengembalian dana menjadi tanggung jawab desa tersebut, bukan kelompok. Apabila terjadi kemacetan, maka desa tsb mendapat sanksi berupa isolasi sementara dari bantuan hingga melunasi pinjaman.
- Pola proteksi petani dan pengembangan koperasi

Pelayanan sosial

- Fisik: pembangunan sarana fisik dengan cara swakelola oleh masyarakat sedangkan material, peralatan, dan tenaga teknis disediakan pemerintah
- Pengembangan telepon masyarakat di luar PT Telkom, yaitu dengan bekerjasama dengan BPPT Jakarta menggunakan sistem PABX
- Pembuatan KTP dan Akte kelahiran gratis
- Pelayanan perijinan satu atap
- Pemberian insentif kepada tokoh agama Rp 250.000,- per bulan
- Setiap bulan dilakukan pengundian KTP Jembrana dengan hadiah utama sepeda motor
- Asuransi kematian setiap penduduk Jembrana sebesar Rp 1 juta

Partisipasi Masyarakat dalam Pemetaan dan Perencanaan Program Pengentasan Kemiskinan (P4K)

Kasus: Kota Bandar Lampung

- Bandar Lampung memiliki luas 192,2 km². Tahun 2002 jumlah penduduknya mencapai 860.172 jiwa dan 50% diantaranya termasuk dalam kategori miskin.
- Tiga kecamatan yang paling banyak penduduk miskinnya menjadi target proyek P4K ini, yaitu kec *teluk betung barat*, *teluk betung selatan*, dan *panjang*.

- Secara umum tujuan P4K adalah: (1) mengidentifikasi keluarga miskin, profil, dan memetakan kondisi, permasalahan sarana dan prasarana lingkungan dengan menggunakan metode partisipasi aktif masyarakat, (2) mengidentifikasi kondisi, masalah, dan kebutuhan keluarga miskin, infrastruktur dan pelayanan di sekitarnya, (3) menyediakan peta dan *database* kemiskinan yang dapat digunakan oleh dinas tau lembaga yang memerlukan.
- Dengan adanya P4K ini, kriteria orang miskin tidak ditentukan oleh pemerintah (BKKBN atau BPS) tetapi oleh masyarakat sendiri.
- Tim P4K terdiri dari fasilitator lokal yang melaksanakan kegiatan P4K; relawan yang bekerja untuk memetakan kemiskinan dan memutakhirkan data pemerintah kota, dan lembaga pendamping, mis URDI

Hasil dari kegiatan P4K:

- Terakomodasinya penanggulangan kemiskinan di dalam tujuan dan strategi kelurahan, kecamatan, dan kota
- Tersedianya data dan informasi mengenai program prioritas pengentasan kemiskinan
- Tersedianya prosedur, mekanisme dan output pelaksanaan Rencana Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan

Kondisi setelah adanya P4K:

- **Masyarakat:** lebih peduli dengan keadaannya sendiri, lebih percaya mereka dapat berubah dengan adanya institusi legal yang menampung aspirasi mereka. Mengerti bahwa dana pemerintah terbatas, berani menyuarakan aspirasi, mampu menganalisa kondisi fisik, sosial, ekonomi di wilayahnya masing-masing.
- **Pemerintah:** lebih paham kesulitan masyarakat, lebih peduli dan komit untuk memperjuangkan dan merealisasikan usulan masyarakat dengan cara mengajak dinas/instansi terkait untuk ikut mendengar usul masyarakat
- **Kota Bandar Lampung:** mempunyai database jumlah penduduk miskin, yang bukan dari pemerintah tetapi dari masyarakat sendiri, yang lebih valid.